



# Upaya Diploması Pertahanan ASEAN Di Laut Cina Selatan

(ASEAN Defense Diplomacy Efforts in the South China Sea)

Arcelinocent Pangemanan, Azmi Ibrahim, Bundhi Tri Suryanti, Fajar Hermansah,

Pragyaa Rihesvar Brahma Putra

Universitas Pertahanan Indonesia

Corresponding Author: [Arcelinocentpangemanan@gmail.com](mailto:Arcelinocentpangemanan@gmail.com)

## *Abstract*

*The complexity of the South China Sea issues has sparked overwhelming international attention, whereas overlapping claims between various countries and the presence of external interest result in the instability of the South China Sea itself. When it comes to the South China Sea, its significance as one of the main global trade routes and its nature as a geographically blessed region with an abundant amount of natural resources is certainly inseparable. With that in mind, the presence of the South China Sea is considered a significant advantage for the countries around it, especially ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) countries that are now considered as an emerging power in the Asia – Pacific Region. Thus, this research provides a broader understanding of how ASEAN as the epicenter of civilization in the South China Sea could maximize the utilization of its diplomatic corridors, such as the ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) and ADMM Plus as a form of realizing and ensuring stability and security in the region. This is considered a part of an ASEAN effort to establish one of the pillars of ASEAN, which is ASEAN Political-Security Community, in which through ADMM might projects a clear vision of ASEAN to create a more united and cohesive actor regionally and internationally.*

**Keywords:** ASEAN, Defense Diplomacy, South China Sea, ADMM



## 1. Pendahuluan

Pada abad ke-21 ini, Laut Cina Selatan (LCS) telah menjadi suatu kawasan yang sangat strategis dan sekaligus rawan. Ini tentu dikarenakan dalam perspektif keamanan tradisional, Laut Cina Selatan yang merupakan bagian dari kawasan Asia-Pasifik memiliki peluang yang diperebutkan oleh banyak negara, ini kemudian yang mana dapat mengakibatkan pecahnya konflik antarnegara. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara Asia Tenggara khususnya ASEAN sebagai yang mewadahi kerja sama antara kesepuluh anggotanya, karena dalam menyikapi konteks Laut Cina Selatan, ASEAN berandil besar dalam menjadi suatu *balancing power* ditengah banyaknya kepentingan eksternal yang secara terus menerus menghantui Laut Cina Selatan. Sikapi ASEAN ini tegak lurus dengan tujuan yang melatar belakangi terbentuknya ASEAN itu sendiri, dimana ASEAN berdiri berdasarkan keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera (Kementerian Luar Negeri RI, 2017). Hal tersebut masih relevan hingga saat ini, karena situasi di kawasan sejak berdirinya ASEAN pada tahun 1960-an hingga saat ini terus diperhadapkan dengan situasi rawan konflik, yang mana apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga mempersulit pelaksanaan pembangunan.

Signifikansi Laut Cina Selatan tertumpu pada sifatnya sebagai suatu jalur perdagangan vital dunia, yang mana secara geografis terletak secara strategis diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia sendiri memandang Laut Cina Selatan sebagai suatu bagian dari kawasan Asia – Pasifik, yang mana memiliki posisi geografis yang sangat strategis sebagai jalur pelayaran dan komunikasi internasional, serta dipenuhi oleh potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi yang berpeluang untuk dieksplorasi (Buku Putih Pertahanan RI, 2015). Laut Cina Selatan sendiri dikelilingi oleh negara seperti Indonesia, Malaysia, Cina, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Thailand dan Vietnam, namun kepentingan nasional dari suatu negara yang mengarungi Laut Cina Selatan jauh lebih banyak dari pada negara-negara tersebut. Sifatnya yang strategis juga memicu maraknya bentuk-bentuk



kekahatan lintas negara yang kerap mengganggu stabilitas kawasan beserta dengan alur-alur perdagangan internasional, ini yang mana membuat ASEAN memiliki peranan yang teramat khusus dalam mencegah dan menganggulangi maraknya bentuk-bentuk kejahatan seperti demikian.

Namun dengan menyadari akan cepatnya perubahan yang terjadi maka ASEAN sebagai episenter ditengah lautan kepentingan di Laut Cina Selatan bersepakat untuk mengedepankan 3 pilar sebagai suatu langkah bagi ASEAN untuk secara proaktif dalam menyikapi perubahan geostrategis serta menciptakan stabilitas di Laut Cina Selatan, ketiga pilar tersebut terdiri dari:

1. *ASEAN Political and Security Community;*
2. *ASEAN Economic Community;* dan
3. *ASEAN Sosio-Cultural Community.*

Ketiga pilar merupakan bagian dari suatu kerangka *ASEAN Community*, yang mana menjadi visi ASEAN saat ini. *ASEAN Community* ini sendiri merupakan upaya untuk membangun dan memperdalam proses integrasi, di mana rakyat kita menikmati hak asasi manusia dan fundamental kebebasan, kualitas hidup yang lebih tinggi dan manfaat dari pembangunan komunitas, penguatan rasa kebersamaan dan identitas bersama, dipandu oleh tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN (The ASEAN Secretariat, 2015). Namun menyikapi adanya keberadaan kekuatan besar yang ikut mengarungi Laut Cina Selatan, maka ASEAN memanfaatkan kerangka diplomasi dalam *ASEAN Political and Security Community* yang dikenal dengan istilah diplomasi pertahanan, suatu konsep yang berkembang pesat sejak Perang Dingin berakhir, yang mana menurut Andrew Cottey dan Anthony Forster sebagai suatu bentuk diplomasi yang memiliki arti upaya untuk meningkatkan hubungan dan mencegah terjadinya konflik dengan musuh potensial dan menggali pelajaran yang dari pihak lain (Cottey & Forster, 2004).

Ini kemudian yang mana untuk melangsungkan upaya *deterrence* agar kawasan dapat stabil dari segala bentuk ancaman maka ASEAN mengedepankan kerangka diplomasi pertahanan yaitu *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM) yang berdiri



pada tahun 2006, suatu bentuk mekanisme konsultasi dan kerjasama pertahanan tertinggi di ASEAN, dimana semua negara bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya dan keyakinan melalui pemahaman yang lebih besar tentang pertahanan dan keamanan serta peningkatan dan penyesuaian. Forum ADMM sendiri memiliki anggota tetap yang terdiri dari semua anggota ASEAN, namun pada tahun 2007, setiap negara anggota ASEAN bersepakat untuk mengadopsi ADMM Plus, suatu ruang yang mana dapat memberikan ADMM ruang gerak untuk berinteraksi dengan mitra dialog lainnya. Jika dilihat pada ADMM Plus Concept Paper tahun 2007, disepakatinya ADMM Plus berangkat pada dasarnya bahwa “Masa depan ASEAN semakin terkait dengan perkembangan kawasan Asia Pasifik yang lebih luas, dan bahwa kawasan akan mendapat manfaat dari keahlian, perspektif, dan sumber daya negara-negara ekstra-regional.” Kini sangat jelas bahwa proses ADMM dan ADMM-Plus berorientasi pada memungkinkan negara-negara Asia Tenggara untuk secara kolektif menyediakan suatu takaran ketangguh dan adil dalam memandang tantangan-tantangan kemanusiaan (Tan, 2011).

Perlu digarisbawahi bahwa walau terdapat keberadaan aktor eksternal sebagai mitra dialog, ASEAN memandang bahwa sekiranya tidak dapat mengintervensi segala bentuk urusan dalam ruang lingkup kawasan Asia Tenggara. Ini kemudian yang mana memberikan garis besar akan area-area utama dari ADMM itu sendiri, yang mana menurut Prof. Ruhanas Harun, Ph.D (1 Juli 2021) terdiri dari:

1. Mempromosikan kerjasama pertahanan dan keamanan regional;
2. Membentuk dan berbagi norma;
3. Pencegahan konflik;
4. Resolusi konflik; dan
5. Peace Building.

Dari kelima area ini, hanya poin kelima yang menjadi satu-satunya area yang paling sering dijalankan dengan baik oleh ADMM dan ADMM Plus, sedangkan mewujudkan area-area utama lainnya belum begitu tampak terlihat dan oleh sebab itu ini merupakan suatu bentuk kekurangan dari ADMM itu sendiri. Sementara waktu jika diterka dalam



konteksnya di Laut Cina Selatan, area-area utama dari ADMM sekiranya harus dapat berjalan dengan baik, karena sangat esensial dalam mewujudkan stabilitas di kawasan tersebut. Dengan berangkat pada pemahaman di atas dan gentingnya permasalahan yang ditemukan di Laut Cina Selatan, maka ASEAN memiliki peranan yang teramat besar terkait marawat Laut Cina Selatan dalam menjadi suatu kawasan yang kondusif dan stabil. Peran ASEAN terkait Laut Cina Selatan tertumpu pada upaya-upaya mitigasi dan pencegahan, yang mana lahir melalui suatu bentuk musyawarah dan mufakat yang dicapai antara negara-negara anggotanya.

## **2. Pembahasan**

### **2.1. ASEAN Sebagai Sebuah Organisasi Antarpemerintah: Prinsip-Prinsip, Pilar-Pilar, Institusi-Institusi, dan Lingkup Diplomasi Pertahanan di Dalamnya**

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan adanya penandatanganan Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok) dari para pendirinya, yaitu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand (Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia, 2021). ASEAN didirikan para pendirinya karena adanya keinginan kuat mereka untuk menciptakan Kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan juga sejahtera (Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia, 2021). Hal ini terjadi karena pada era 1960-an, adanya situasi rawan konflik akibat perebutan pengaruh ideologi negara-negara berkekuatan besar (Amerika Serikat dan Uni Soviet), dan juga banyaknya konflik antarnegara yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan di Kawasan Asia Tenggara (Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia, 2021).

Deklarasi ASEAN telah menjelaskan dengan detail tentang tujuan-tujuan ASEAN sebagai sebuah Organisasi Antarpemerintah. Tujuan-tujuan ASEAN tersebut antara lain (ASEAN Organization, 2021):

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di Kawasan melalui usaha-usaha bersama dalam

- semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan Negara-Negara di Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
2. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan menghormati keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antarnegara di Kawasan, dan kepatuhan pada prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
  3. Mempromosikan kerja sama aktif dan bantuan timbal balik dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmiah, dan administrasi;
  4. Saling membantu dalam bentuk fasilitas pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, profesi, teknis, dan administrasi;
  5. Berkolaborasi secara lebih efektif untuk pemanfaatan yang lebih besar dari pertanian dan industry, perluasan perdagangan, termasuk studi tentang masalah-masalah perdagangan komoditas internasional, peningkatan fasilitas transportasi dan komunikasi, dan peningkatan standar hidup masyarakat negara-negara yang tergabung di ASEAN;
  6. Mempromosikan studi-studi tentang Asia Tenggara;
  7. Dan memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional dengan tujuan yang sama yang ada, serta mengeksplorasi semua jalan untuk kerja sama yang lebih erat.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, negara-negara anggota ASEAN berhubungan dengan mengadopsi prinsip-prinsip dasar yang telah tercantum dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) pada 1976 (ASEAN Organization, 2021). Prinsip dasar yang pertama yaitu saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah, dan identitas nasional semua bangsa. Kedua, adanya hak setiap Negara untuk memimpin eksistensinya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, atau paksaan. Ketiga, tidak ikut campur dalam urusan internal satu sama lain. Keempat, penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai. Kelima, penolakan terhadap ancaman atau



penggunaan kekerasan. Terakhir, kerja sama yang efektif di antara negara-negara anggota ASEAN.

Sebagai sebuah Organisasi Antarpemerintah, ASEAN memiliki perbedaan dengan EU (*European Union*) sebagai sebuah organisasi yang memiliki pengaruh kuat di suatu Kawasan (ASEAN di Asia Tenggara, dan EU di Eropa). Perbedaan yang paling jelas terlihat adalah ASEAN tetap berpegang sebagai sebuah Organisasi Antarpemerintah, sedangkan EU merupakan sebuah organisasi supranasional (Koh, 2017). Sebagai sebuah organisasi supranasional, negara-negara anggota EU telah secara sukarela setuju menyerahkan sebagian dari kedaulatan mereka, dan kedaulatan gabungan dilaksanakan oleh Komisi Eropa (*European Commission*) atas nama negara-negara anggota (Koh, 2017). Hal ini berbeda dengan ASEAN, di mana jika dilihat dari prinsip-prinsip dasar ASEAN dalam berhubungan antarnegara anggotanya yang telah disebutkan di atas, maka terlihat jelas bahwa tidak adanya pemberian kedaulatan dari negara-negara kepada ASEAN, dan juga diterapkannya prinsip non-interferensi (*non-interference*) dalam urusan domestik negara-negara yang merupakan anggotanya. Dapat dikatakan bahwa prinsip *non-interference* ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas kawasan/regional sejak berdirinya ASEAN (Dosch, 2011). Terlepas dari perbedaan tersebut, baik ASEAN ataupun EU menyediakan sumber-sumber berharga bagi Hubungan Internasional di dunia (He, 2016).

Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) terdiri dari tiga pilar, yaitu *ASEAN Political-Security Community* (APSC), *ASEAN Economic Community* (AEC), dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC), di mana masing-masing pilar memiliki cetak birunya (*blueprint*) masing-masing (ASEAN Organization, 2021). Lingkup diplomasi pertahanan dalam ASEAN termasuk dalam pilar *ASEAN Political-Security Community*, di mana salah satu pertemuan yang paling signifikan dalam membahas isu-isu politik dan keamanan di Kawasan dan juga erat kaitannya dengan diplomasi pertahanan adalah *ASEAN Defense Ministers' Meeting* (ADMM).



Setelah membahas mengenai ASEAN sebagai sebuah organisasi antarpemerintah di Kawasan Asia Tenggara, tujuan-tujuan ASEAN, prinsip-prinsip dasar negara-negara anggota ASEAN dalam berhubungan satu sama lainnya, perbedaan mendasar antara ASEAN dan EU, serta pilar-pilar dalam ASEAN dan lingkup diplomasi pertahanan dalam ASEAN yang terwujud dalam bentuk ADMM, pembahasan selanjutnya akan berfokus pada peran ADMM dalam membentuk keamanan dan stabilitas Laut Cina Selatan, termasuk strategi-strategi dan hambatan-hambatan yang ada. Pembahasan mengenai organisasi ASEAN di atas dapat menjadi panduan dan pengetahuan dalam membahas pembahasan berikutnya tentang peran ADMM di Laut Cina Selatan.

## **2.2. The Role of ASEAN Defence Ministers' Meeting in South China Sea: Strategies and Challenges**

Pembentukan ADMM pada Mei 2006 memungkinkan diskusi kerja sama pertahanan di tingkat ASEAN. Program Kerja ADMM berfokus pada pertukaran perspektif, meningkatkan dan memperdalam rasa saling percaya, pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan pertahanan dan keamanan satu sama lain, membangun kepercayaan, kerja sama praktis termasuk dengan negara-negara Plus, dan membangun prosedur komunikasi di antara pertahanan dan militer negara-negara ASEAN (Chye, 2016). Pertemuan ADMM yang diprakarsai oleh para panglima pasukan pertahanan, kepala tiga cabang militer, kepala intelijen, dan kunjungan pertukaran perguruan tinggi pertahanan, telah meningkatkan diplomasi pertahanan, memperkuat hubungan interpersonal dan kerja sama, dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan negara satu dengan yang lain. Inisiatif ADMM ini telah mendorong suasana yang kondusif untuk kerjasama antara militer negara-negara ASEAN serta kerjasama ekonomi dan sosial budaya.

Namun, kerja sama militer di tingkat ASEAN masih terbatas karena kepekaan negara-negara ASEAN dan kekhawatiran kedaulatan nasional seperti perbedaan pendekatan pertahanan dan kerja sama nasional, serta dalam tingkat



pengembangan, peralatan, dan prosedur operasional pertahanan. Oleh karena itu, diperlukan diplomasi politik dan pertahanan untuk mengelola kerjasama dan hubungan baik antar negara ASEAN. Bahkan kerjasama anti-pembajakan di Selat Malaka disebut sebagai patroli angkatan laut dan udara terkoordinasi, bukan patroli bersama, dan negara-negara pengguna Selat tersebut hanya dapat memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan keselamatan navigasi di Selat (Chye, 2016). Kerja sama pertahanan tingkat ASEAN akan terus berkembang secara bertahap karena keragaman ideologi nasional, keprihatinan dan pandangan militer negara-negara ASEAN, dan perbedaan tingkat pembangunan. Karena keragaman negara anggota, ASEAN tidak akan pernah seperti Uni Eropa yang struktur organisasi dan kebijakannya bersifat supranasional. Bentuk organisasi ASEAN yang memiliki keragaman tinggi seperti ini merupakan kelemahan dan juga kekuatan tersendiri, karena dengan menyadari perbedaan tersebut, ASEAN memiliki cara tersendiri untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di kawasan yang acap kali disebut sebagai *ASEAN Way*.

Salah satu pilar kekuatan integrasi kawasan Asia Tenggara adalah adanya norma atau nilai-nilai yang menjadi ciri khas ASEAN yaitu *ASEAN Way*. Dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang dimiliki norma ASEAN, stabilitas Asia Tenggara merupakan bukti bahwa norma tersebut berkontribusi positif. *ASEAN Way* adalah konsep lingkungan sosial yang menekankan efek keakraban, konsensus, konsultasi, non-intervensi dan sebisa mungkin menghindari konflik dan masalah (Johnston, 2003). Acharya (1998) juga mendeskripsikan *ASEAN Way* sebagai realisasi dari hubungan interpersonal para pemimpin ASEAN, ekspresi persamaan budaya, norma-norma yang diakui dan disetujui serta disepakati dengan kesadaran tinggi untuk menjaga ASEAN. Kekhasan inilah yang membedakan ASEAN dengan Uni Eropa (EU), karena ASEAN diibaratkan sebagai “kampung” yang senantiasa melekat dalam setiap proses diplomasi negara ASEAN (Acharya, 1998:56).



ADMM telah terlibat dalam kerjasama dalam masalah keamanan non-tradisional tetapi tidak pada masalah keamanan tradisional yang dapat melibatkan persaingan kekuatan besar dan dapat mempengaruhi kerjasama ADMM-Plus. Pertemuan ADMM-Plus di Kuala Lumpur pada 4 November 2015 melihat ASEAN mempertahankan kesatuannya dengan tidak mengeluarkan deklarasi bersama, karena negara-negara besar tertentu menginginkan kata-kata tertentu untuk menyebutkan Laut Cina Selatan yang tidak dapat disetujui oleh ASEAN. Dulu, Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan KTT Pemimpin ASEAN telah menyatakan posisi ASEAN dalam masalah keamanan tradisional. Meskipun ASEAN telah menyatakan keprihatinannya bahwa perkembangan di Laut Cina Selatan dapat mempengaruhi perdamaian dan stabilitas, namun ASEAN menginginkan agar perselisihan tersebut dikelola dan diselesaikan secara damai melalui negosiasi sesuai dengan hukum internasional termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 2002. DoC, dan CoC setelah selesai. ASEAN juga tidak ingin perselisihan mendominasi bidang kerja samanya yang luas, termasuk dengan mitra dialognya. Ini adalah salah satu bentuk upaya penyelesaian masalah menggunakan *ASEAN Way* tersebut.

Publikasi ADMM tentang *ASEAN Security Outlook* akan mendukung upaya dan mencerminkan komitmen negara-negara anggota untuk mempromosikan transparansi yang lebih besar, pembangunan kepercayaan dan pemahaman tentang tantangan dan persepsi keamanan regional di Asia Tenggara. Mempromosikan kerja sama dan pemahaman yang lebih erat di antara militer negara-negara ASEAN akan membantu mencegah konflik terbuka di ASEAN.

ADMM merupakan instrumen penting dalam upaya ASEAN untuk membentuk komunitas politik-keamanan (*ASEAN Political-Security Community, APSC*) sebagai salah satu dari tiga pilar Komunitas ASEAN. Proyek pembentukan komunitas ini bertujuan untuk menciptakan kembali ASEAN sebagai aktor yang lebih bersatu dan kohesif di kawasan serta komunitas internasional (Shoji, 2013). ADMM akan bersama-sama mengatasi tantangan keamanan kawasan, khususnya



tantangan nontradisional. Menyelenggarakan ADMM adalah salah satu pencapaian luar biasa dalam upaya ASEAN untuk membangun komunitas politik-keamanan, dengan tujuan mempromosikan pencegahan konflik dan pembangunan kepercayaan. ADMM telah dianggap sebagai mekanisme yang berhasil berfokus pada pembangunan pertahanan ASEAN. ADMM telah membangun fondasi awal yang penting untuk kerja sama pertahanan multilateral di antara negara-negara ASEAN dan antara ASEAN dan mitra utamanya, melalui penyediaan platform untuk dialog strategis di tingkat menteri pertahanan dan menciptakan kerangka kerja untuk kerja sama praktis di antara militer regional.

Namun, lingkungan geopolitik yang berubah mengharuskan ADMM untuk melampaui bentuk dasar seperti dialog dan kerja sama praktisnya untuk menangani masalah keamanan yang muncul, seperti peningkatan situasi di Laut Cina Selatan. Ketegangan di Laut Cina Selatan yang dapat menyeret Amerika Serikat dan Cina akan sangat merugikan ASEAN. Justru itu, di tengah kerja sama ekonomi yang semakin menguntungkan, diperlukan kerja sama kolektif yang padu antar negara ASEAN untuk menghadapi kekuatan Cina dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan (Muzaffar, 2012). ADMM dapat menjadi *spearhead* untuk kerja sama kolektif tersebut, tetapi sebelumnya sensitivitas antara negara-negara ASEAN terkait keamanan dan pertahanan nasional harus dapat diatasi dan dijawab dengan baik, agar seluruh negara-negara ASEAN dapat bersatu untuk mengatasi segala ancaman yang berada di Kawasan Asia Tenggara, khususnya di Laut Cina Selatan.

### **3. Penutup**

#### **3.1. Kesimpulan**

ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967, karena adanya keinginan kuat untuk menciptakan Kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan juga sejahtera. Hal ini terjadi karena pada era 1960-an, adanya situasi rawan konflik akibat perebutan pengaruh ideologi negara-negara berkekuatan besar (Amerika Serikat dan Uni Soviet), dan juga banyaknya konflik antarnegara yang apabila dibiarkan



dapat mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan di Kawasan Asia Tenggara. Tujuan-tujuan ASEAN sebagai sebuah Organisasi Antarpemerintah, terdapat dalam Deklarasi ASEAN dan telah dijelaskan dengan detail. Kemudian untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, negara-negara anggota ASEAN berhubungan dengan mengadopsi prinsip-prinsip dasar yang telah tercantum dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) pada 1976.

ASEAN selaku Organisasi Kawasan, memiliki perbedaan dengan Uni Eropa atau NATO sekalipun, contohnya seperti Uni Eropa yang merupakan Supranational Organization, dimana negara anggota telah memberikan kedaulatannya kepada Uni Eropa, contohnya adalah peran *European Commission* yang bertindak layaknya pemerintah, dapat memberlakukan hukum, dan dapat melakukan perjanjian dengan negara lain. Sedangkan ASEAN merupakan *Inter-Governmental Organization*, dimana kedaulatan masih dipegang oleh negara-negara ASEAN, semua keputusan harus melalui konsensus negara ASEAN, tidak ada hukum yang berlaku khusus bagi negara anggota ASEAN. Semua perjanjian internasional hanya bisa berlaku di negara anggota ASEAN apabila negara tersebut meratifikasi perjanjian tersebut. Di ASEAN sendiri ada norma *ASEAN Way* dimana terdapat prinsip non-interferensi (*non-interference*) antar negara anggota.

Dalam ASEAN terdapat tiga pilar yaitu Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN, setiap pilar memiliki cetak birunya (*blueprint*) masing-masing. Diplomasi Pertahanan di ASEAN terdapat dalam pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN di mana salah satu pertemuan yang paling terkenal adalah adanya ADMM atau Pertemuan Para Menteri Pertahanan ASEAN, yang berfungsi membuat strategi dari hambatan yang ada untuk menciptakan keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, termasuk soal Laut Cina Selatan.

ADMM yang dibentuk pada tahun 2006 berfokus pada pertukaran perspektif dan informasi antar anggota, membangun dan meningkatkan rasa saling percaya antar negara anggota ASEAN, menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang



kebijakan pertahanan dan keamanan satu sama lain, melakukan kerjasama praktis dalam bidang pertahanan termasuk dengan negara-negara diluar ASEAN dan membangun prosedur komunikasi diantara Aktor pertahanan dan militer negara ASEAN. Keberadaan ADMM telah meningkatkan diplomasi pertahanan, memperkuat hubungan interpersonal, serta mendorong suasana kondusif kerjasama antar militer, ekonomi dan sosial budaya negara-negara anggota ASEAN.

Dalam ASEAN sendiri diperlukan diplomasi politik dan pertahanan untuk mengelola kerjasama hubungan yang baik antara anggota ASEAN, karena dalam ASEAN sendiri kerjasama militer itu belum maksimal dan masih terbatas akibat adanya perbedaan kepekaan negara-negara ASEAN, adanya kekhawatiran tentang kedaulatan nasional, adanya perbedaan pendekatan pertahanan, adanya perbedaan kerjasama internasional termasuk kebijakannya politik luar negeri, perbedaan pengembangan bidang pertahanan termasuk peralatan dan prosedur operasionalnya, serta adanya keanekaragaman lain berupa adanya perbedaan ideologi, sosial budaya, pembangunan, terutama perbedaan ekonomi antar anggota. Namun masalah perbedaan-perbedaan diatas dapat diminimalisir karena adanya norma *ASEAN Way*, yang merupakan konsep lingkungan sosial yang menekankan efek kekraban, konsensus, konsultasi, non-intervensi dan sebisa mungkin menghindari konflik dan masalah, sehingga terwujud stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.

ADMM telah meningkatkan diplomasi pertahanan, memperkuat hubungan interpersonal dan kerjasama, mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan satu dengan yang lainnya sehingga tercipta suasana kondusif kerjasama antara militer, kerjasama ekonomi dan sosial budaya negara-negara anggota ASEAN. ASEAN dan ADMM mempunyai keterbatasan soal keamanan tradisional karena hanya berfokus dalam kerjasama masalah keamanan non tradisional. Hal ini membuka peluang kekuatan besar untuk mempengaruhi kerjasama termasuk kerjasama ASEAN di dalam pertahanan sehingga terciptanya ADMM Plus.



ASEAN telah menyatakan keprihatinannya bahwa perkembangan di Laut Cina Selatan dapat mempengaruhi perdamaian dan stabilitas, namun ASEAN menginginkan agar perselisihan tersebut dikelola dan diselesaikan secara damai melalui negosiasi sesuai dengan hukum internasional termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 2002. DoC, dan CoC setelah selesai. ASEAN juga tidak ingin perselisihan mendominasi bidang kerja samanya yang luas, termasuk dengan mitra dialognya. Ini adalah salah satu bentuk upaya penyelesaian masalah menggunakan *ASEAN Way* tersebut. ADMM menghasilkan publikasi tentang *ASEAN Security Outlook* yang memungkinkan adanya transparansi yang lebih besar sehingga menumbuhkan kepercayaan dan pemahaman tentang keamanan regional Asia Tenggara sehingga membantu mencegah konflik terbuka di ASEAN.

Perubahan lingkungan geopolitik termasuk memanasnya peningkatan situasi di Laut Cina Selatan, membuat ADMM harus melampaui bentuk dasar seperti dialog dan kerjasama praktisnya dalam hal masalah keamanan yang muncul karena adanya dua kekuatan besar seperti Amerika dan Cina yang sangat merugikan ASEAN. Namun di tengah kerjasama ekonomi yang semakin menguntungkan, diperlukan adanya kerjasama kolektif yang padu dan ADMM dapat menjadi pelopor untuk kerjasama kolektif tersebut, dengan catatan berbagai masalah dan juga konflik antara negara-negara anggota ASEAN sendiri dalam hal keamanan dan pertahanan harus diselesaikan terlebih dahulu agar seluruh negara ASEAN dapat bersatu untuk mengatasi segala ancaman yang berada di kawasan Asia Tenggara khususnya soal Laut Cina Selatan.

### **3.2. Saran**

Terlepas dari segala kekurangannya, ASEAN selaku organisasi kawasan harus lebih solid dan juga harus terbangun keharmonisan antar negara anggota. Perbedaan kepentingan nasional, tujuan nasional, kebijakan politik luar negeri, kondisi dalam negeri dan lain sebagainya dari negara anggota asean harus diminimalisir dan tetap disatupadukan dalam kerangka organisasi regional



ASEAN. Hubungan yang baik antar negara anggota baik dalam konteks bilateral dan multilateral akan membuat ASEAN fokus keluar dengan melihat ancaman dalam satu pandangan yang sama, oleh karenanya masalah di antara negara anggota ASEAN seperti masalah batas wilayah yang terjadi sengketa, masalah ancaman keamanan non-tradisional, dan lain sebagainya harus diatasi segera mungkin.

Keberadaan faktor lain seperti adanya negara *super power* seperti Cina dan Amerika Serikat, serta pihak lain seperti Organisasi Internasional seperti IGO, NGO, bahkan PBB, Uni Eropa, NATO dan lain sebagainya tentu juga akan berpengaruh kepada ASEAN itu sendiri, namun ASEAN harus dapat menjadi satu kesatuan entitas dalam menjawab Lingstra, ancaman dan tantangan yang ada dengan ASEAN Way dan Musyawarah Mufakat. Selain itu, ASEAN juga harus mampu memanfaatkan dan memaksimalkan forum maupun lembaga yang sudah ada seperti keberadaan ARF, ADMM, ADMM Plus, dan institusi lain, termasuk memaksimalkan prinsip, pilar, fungsi dan peran ASEAN itu sendiri dalam Diplomasi Pertahanan untuk menghadapi ketegangan di Laut Cina Selatan.



## Daftar Pustaka

- Acharya, A. (1998). Culture, security, multilateralism: The 'ASEAN way' and regional order. *Contemporary Security Policy*, 19(1), 55-84.
- ADMM-Plus Concept Paper 2007. Retrieved from [https://admm.asean.org/dmdocuments/4.%20Annex%20G\\_ADMM-Plus%20Concept%20Paper.pdf](https://admm.asean.org/dmdocuments/4.%20Annex%20G_ADMM-Plus%20Concept%20Paper.pdf) . Diunduh pada 10 Juli 2021.
- ASEAN Organization. (2021, July 11). *About ASEAN*. Retrieved July 11, 2021, from [asean.org: https://asean.org/asean/about-asean/](https://asean.org/asean/about-asean/)
- Ba, A. D. (2017). ASEAN and the changing regional order: the ARF, ADMM, and ADMM-Plus. *ASEAN@ 50 Building ASEAN Community: Political–Security and Socio-cultural Reflections*, 146-157.
- Chye, T. S. (2016). Strengths and Weaknesses of the ADMM and ADMM-Plus. *The Future of the ADMM/ADMM-Plus and Defence Diplomacy in the Asia Pacific*.
- Cottey, A. & Forster, A. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Adelphi Paper 365, London: Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies.
- Dosch, J. (2011). Southeast Asia: ASEAN and the challenge of regionalism. In M. K. Connors, R. Davison, & J. Dosch, *The new global politics of the Asia Pacific* (2nd ed., pp. 121-139). London: Routledge.
- Harun, R. (1 Juli 2021). "ASEAN Defence Diplomacy Efforts in the South Cina Sea." Seminar Kuliah Kerja Luar Negeri (KKLN) UNHAN, Universitas Pertahanan.
- He, J. (2016, March 04). Normative Power in the EU and ASEAN: Why They Diverge. *International Studies Review*, 18(1), 92-105. doi:<https://doi.org/10.1093/isr/viv028>
- Johnston, A. I. (2003). Socialization in International Institutions: The ASEAN Way and International Relations Theory. In G. John Ikenberry & Michael Mastanduno (Eds.), *International Relations Theory and the Asia Pacific* (pp. 107- 162). New York: Columbia University Press.



- Kassim, Y. R. (2011). ADMM Plus. New Twist to Old Security Issues. In *Strategic Currents* (pp. 218-220). ISEAS Publishing.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2017). ASEAN Selayang Pandang: Satu Visi, Satu Identitas, Satu Masyarakat. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri.
- Koh, T. (2017, August 22). *ASEAN and the EU: Differences and Challenges*. Retrieved July 11, 2021, from [straitstimes.com: https://www.straitstimes.com/opinion/asean-and-the-eu-differences-and-challenges](https://www.straitstimes.com/opinion/asean-and-the-eu-differences-and-challenges)
- Muzaffar, C. (2012). How to Resolve Conflicts in the South Cina Sea Al-Jazeera English 4 July 2012
- Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia. (2021, July 11). *Tentang ASEAN: Latar Belakang*. Retrieved July 11, 2021, from [setnas-asean.id: http://setnas-asean.id/tentang-asean](http://setnas-asean.id/tentang-asean)
- Shoji, T. (2013). ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) and ADMM Plus: A Japanese Perspective. *NIDS Journal of Defense and Security*, 14, 3-17.
- Tan, S. S. (2011). "From Talkshop to Workshop: ASEAN's Quest for Practical Security Cooperation through the ADMM and ADMM Plus Processes." Dalam Singh, B. & Tan, S. (2011). From 'Boots' to 'Brogues': The Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia. *RSIS Monograph No. 21*, Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies.
- Tan, S. S. (2016). The ADMM-Plus: regionalism that works?. *Asia Policy*, 22(1), 70-75.
- The ASEAN Secretariat. (2015). ASEAN 2025: Forging Ahead Together. Jakarta: The ASEAN Secretariat.